

HUBUNGAN ANTARA KAPASITAS SUMBER DAYA
Universitas Teuku Umar

Ika Rahmadani

HUBUNGAN ANTARA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Ika Rahmadani ¹⁾

Syarifah Hanifa Soraya ²⁾

¹⁾ Universitas Teuku Umar – Meulaboh

²⁾ Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengelola anggaran yang ada di lingkungan Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan jumlah unit analisis sebanyak 22 satuan kerja dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Penelitian ini dilakukan secara sensus melalui penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

Kata kunci: Kapasitas SDM, Teknologi Informasi, Kesiapan Instansi Pemerintah, SAP Basis Akrual

Abstract: *This study aims to examine the relationship between human resource capacity, the use of information technology and the readiness of government agencies in the application of accrual-based government accounting system either simultaneously or partially. The population in this study are all budget managers in the Office of the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh with the number of units analysis as many as 22 work units with the number of respondents as many as 80 people. This research was conducted by census through the spreading of questioner which then analyzed by multiple linear regression method. The results of this study indicate that the capacity of human resources and the use of information technology simultaneously and partially affect the readiness of government agencies in the implementation of accounting system of government-based accrual on the work unit within the Ministry of Religious Affairs Office of Banda Aceh City.*

Keywords: *Human Resource Capacity, Information Technology, Government Institution Readiness, Government Accounting System-based accrual*

PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi isu yang sangat penting di era reformasi untuk menciptakan *good government governance*.

Istilah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penelitian ini sejatinya merujuk kepada istilah standar akuntansi sebagaimana termaktub dalam PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam regulasi tersebut pemerintah daerah berkewajiban menerapkan standar akuntansi berbasis akrual, jika nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Status WTP juga berasumsi pada kesiapan pemerintah untuk menyelenggarakan standar akuntansi berbasis akrual secara penuh dan tidak akan memiliki kendala. Kendati begitu, penelitian ini hanya berfokus kepada beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tahun 2010 dinyatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan kebijakan akuntansi sistem akrual selambat-lambatnya yaitu pada tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan (Halim, 2012). Dalam akuntansi berbasis akrual, pencatatan (*recording*) dilakukan pada saat terjadinya arus terhadap sumber daya walaupun kas atau setara kas tidak terjadi perubahan sehingga dapat menyediakan informasi yang lebih komprehensif (Halim, 2012). Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai PP Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh basis akrual.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak walau sekecil apapun. Perubahan inipun mendapat pernyataan pro-kontra mengenai siap atau tidaknya pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hal ini muncul karena keterkaitan dengan sumber daya manusia yang nantinya akan berkecimpung langsung dalam perubahan ini. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintahan harus melakukan berbagai persiapan untuk menghadapainya. Banyak persiapan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, baik yang berupa peraturan ataupun kebijakan maupun sistem serta sumber daya manusia sebagai salah satu yang menjadi kunci utama terlaksananya akuntansi berbasis akrual.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Simanjuntak, 2010). Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Selain faktor sumber daya manusia, faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu komitmen organisasi/instansi dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam proses pengambilan keputusan yaitu pimpinan organisasi atau instansi itu

sendiri. Simanjuntak (2010) juga menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.

Faktor pendukung selanjutnya yaitu berupa sarana teknologi informasi berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai dan dapat dipahami dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam pemanfaat teknologi ini haruslah mendapatkan ilmu yang cukup dan memadai sehingga tujuan yang ingin dicapai dari SAP ini dapat terwujud dengan optimal. Selain ketiga faktor tersebut, faktor komunikasi antara pemerintah pusat dan instansi yang berada di daerah secara vertikal harus dibangun dengan baik. Sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak-pihak yang enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan SAP berbasis akrual ini dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena pentingnya keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, maka diperlukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor tersebut, sehingga setiap instansi pemerintah dapat melakukan persiapan semaksimal mungkin.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ranuba, Pangemanan, dan Ranuba, Pangemanan dan Pinatik (2015) tentang analisis kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP No 71 Tahun 2010 menemukan, sumber daya manusia, sarana prasarana, sosialisasi terkait dengan biaya masih sangat minim. Temuan ini pun sejalan dengan penelitian Sampel, Kalangi, dan Runtu (2015), Kusuma dan Fuad (2013), dan Fadlan (2013),. Mereka mengungkapkan beberapa kendala dan kurang siapnya pemda dalam menerapkan akuntansi akrual. Penelitian juga dititikberatkan pada persiapan yang harus dilakukan pemda dengan melihat kontribusi faktor-faktor penghambat penerapan SAP akrual.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi dengan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada satuan kerja di lingkungan kantor kementerian agama kota Banda Aceh. Adapun penelitian ini dimulai dengan pendahuluan, kajian kepustakaan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam suatu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik (Mahsun et al., 2013).

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang berlaku sebagai pedoman baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dikelolanya. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*) yang artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. PP Nomor 24 Tahun 2005 kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang meliputi SAP berbasis akrual. Amanat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu bahwa SAP berbasis akrual harus diterapkan selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Tabel 1
Perbedaan Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual

No	Laporan Keuangan	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
1.	Laporan Realisas Anggaran (LRA)	√	√
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran	X	√
3.	Neraca	√	√
4.	Laporan Operasional (LO)	X	√
5.	Laporan Arus Kas (LAK)	√	√
6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	X	√
7.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	√	√

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Kesuksesan perubahan akuntansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak (Simanjuntak, 2010:12). Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan yaitu tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dengan didukung teknologi yang memadai, komitmen dari pimpinan dan organisasi, resistensi terhadap perubahan dan lingkungan/ masyarakat.

Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Fauzan (2013) kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ada dua hal penting dalam penilaian kapasitas sumber daya manusia yaitu tingkatan tanggung jawab dan kompetensi. Tingkatan tanggung jawab dari seorang pegawai dapat dilihat dari deskripsi jabatan yang merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dari seorang pegawai dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti serta keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diemban.

SDM adalah faktor yang ikut berperan dalam terwujudnya implementasi basis akrual ini. Oleh karena itu setiap instansi pemerintahan harus dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya SDM yang ada dilingkungannya sehingga dapat terus mengikuti perkembangan yang nantinya akan dihadapi.

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto,2012). Dalam pengelolaan APBN yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap Satuan Kerja dibekali dengan pemanfaat aplikasi-aplikasi komputer yang dapat mempermudah pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana APBN. Seiring dengan perubahan sistem, maka perubahan pemanfaatan aplikasi juga terjadi.

Dalam hal ini instansi pemerintahan sebagai pengguna (*user*) dari aplikasi-aplikasi tersebut haruslah selalu paham dan *up to date* atas perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai provider aplikasi. Mulai dari aplikasi Rancangan Anggaran, Pencatatan, sampai dengan Pelaporan haruslah selalu dipantau perkembangannya. Sehingga dapat

menghasilkan Laporan Keuangan berbasis Akrua yang diharapkan dapat tersajikan secara benar, transparan dan akuntabel.

Di tahun 2015, banyak sekali sistem yang berubah dalam pengelolaan anggaran APBN. *Resistance* terhadap perubahan tersebut juga dapat dirasakan. Namun karena komitmen dan keharusan dalam penerapan basis akrua ini, maka segala usaha persiapan juga telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan mengikuti berbagai kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Diklat yang masih terus akan dilaksanakan sepanjang tahun 2015 ini. Tahun 2015 merupakan tahun pertama diterapkannya basis akrua sehingga banyak sekali kendala-kendala yang dialami, baik dari kurangnya SDM yang benar-benar paham mengenai akuntansi maupun dalam pemanfaatan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan sampai dengan bulan kedua di Tahun 2015, aplikasi utama dalam proses pelaporan keuangan berbasis akrua belum dapat digunakan oleh satker sehingga laporan keuangan bulanan masih tertunda. Namun, seluruh pengelola anggaran yang terlibat dalam pengelolaan APBN dilingkungan Satker Instansi Kementerian Agama selalu berusaha untuk cepat dan tanggap terhadap informasi-informasi yang berkembang terkait dengan hal tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengelola anggaran yang ada di lingkungan Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan secara sensus dimana responden adalah keseluruhan dari populasi dalam penelitian yaitu pengelola anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan Instansi Kementerian Agama Kota Banda Aceh berjumlah 80 orang.

Tabel 2
Daftar populasi untuk masing-masing Satuan Kerja dilingkungan Instansi
Kementerian Agama Kota Banda Aceh

No	Nama Satuan Kerja	Populasi
1	Kankemenag Kota Banda Aceh (Sekretariat Jenderal)	8
2	Kankemenag Kota Banda Aceh (Ditjen Bimas Islam)	5
3	Kankemenag Kota Banda Aceh (Ditjen Pend. Islam)	10
4	Kankemenag Kota Banda Aceh (Ditjen Peny. Haji dan Umrah)	3
5	MIN Sukadama Banda Aceh	3
6	MIN Ulee Kareng Banda Aceh	3
7	MIN Ulee Lheu Banda Aceh	3
8	MIN Setu Banda Aceh	3
9	MIN Teladan Banda Aceh	3
10	MIN Banda Aceh	3
11	MIN Mesjid Raya Banda Aceh	3
12	MIN Lhong Raya Banda Aceh	3
13	MIN Rukoh Banda Aceh	3
14	MIN Merduati Banda Aceh	3
15	MIN Lambhek Banda Aceh	3
16	MTSN I Banda Aceh	3
17	MTSN II Banda Aceh	3
18	MTSN Rukoh Banda Aceh	3
19	MTSN Meuraxa Banda Aceh	3
20	MAN I Banda Aceh	3

21	MAN II Banda Aceh	3
22	MAN Rukoh Banda Aceh	3
	Jumlah	80

Sumber: Data diolah

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang didapat dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara menyampaikan langsung kepada responden, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Anggaran yang terdapat pada 22 (dua puluh dua) satuan kerja yang ada di lingkungan Instansi Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini telah disesuaikan dengan subjek penelitian. Kuesioner tersebut berisikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan instansi pemerintahan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan hubungannya dengan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komitmen organisasi.

Kuesioner yang telah diisi, diolah, dan dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dikemukakan. Untuk memastikan apakah adanya peran dari komitmen organisasi dalam mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kesiapan instansi pemerintahan dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji interaksi atau *moderated regression analysis* merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas) (Ghozali, 2009:136). Secara matematis alat ukur regresi linear berganda di formulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola anggaran yang ada di lingkungan Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini kuesioner yang disebarkan sebanyak 80 kuesioner dan kuesioner yang kembali berjumlah 75. Dari 75 kuesioner yang telah dikembalikan semuanya dapat digunakan dalam pengolahan data atau sebesar 100%.

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesiapan Instansi	75	6	24	14,65	4,850
Kapasitas SDM	75	7	28	17,19	6,402
Penggunaan TI	75	4	16	10,13	3,577
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai minimum, maksimum dan rata-rata dari tiap variabel yang diteliti. Variabel kesiapan instansi pemerintah mempunyai nilai minimum 6 dan nilai maksimum 24 dengan nilai rata-rata 14,64 dan standar deviasi 4,850. Dari hasil ini maka dapat diinterpretasikan bahwa kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual relatif tinggi (rata-rata 3 dari skala 4).

Variabel struktur kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai minimum 7 dan nilai maksimum 28 dengan nilai rata-rata 17,19 dan standar deviasi 6,402. Dari hasil ini maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kantor kementerian agama kota Banda Aceh relatif cukup (rata-rata 2 dari skala 4).

Varibel penggunaan teknologi informasi mempunyai nilai minimum 4 dan nilai maksimum 16 dengan nilai rata-rata 10,13 dan standar deviasi 3,577. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam satuan kerja kantor kementerian agama kota Banda Aceh relatif tinggi (rata-rata 3 dari skala 4).

Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditentukan berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk menentukan besarnya presentase variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square, seperti yang tampak pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,603 ^a	,363	,336	3,952

a. Predictors: (Constant), Kapasitas SDM, Penggunaan TI

Pada Tabel 4 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,363 yang berarti bahwa hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sedang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 36,3% variabel kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dijelaskan oleh variabel kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi, sedangkan sisanya 63,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Pengujian Secara Parsial

Tabel 4
Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,426	1,559		3,481	,001
	Kapasitas SDM	,342	,082	,451	4,167	,000
	Penggunaan TI	,158	,294	,116	,537	,013

a. Dependent Variable: Kesiapan Instansi

Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, H_{a1} diterima jika $\beta_1 \neq 0$, yaitu nilai β kapasitas regresi SDM tidak sama dengan nol. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa koefisien kapasitas SDM sebesar 0,342, artinya setiap kenaikan 100% kapasitas SDM akan menaikkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar 34,2%. Hal ini berarti bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual (H_1 diterima).

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, H_{a2} diterima jika $\beta_2 \neq 0$, yaitu nilai β penggunaan teknologi informasi tidak sama dengan nol. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa koefisien regresi penggunaan teknologi informasi sebesar 0,158, artinya setiap kenaikan 100% penggunaan teknologi informasi akan menaikkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar 15,8%. Hal ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual (H_2 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima. Hasil temuan tersebut dapat menjelaskan bahwa kapasitas SDM yang ada di kantor kementerian agama kota Banda Aceh rata-rata sedang mampu meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Temuan

ini sejalan dengan hasil penelitian Ardiansyah (2012) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal sama juga dapat ditemukan dalam penelitian Sulani (2010) yang menemukan bahwa sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Damanik (2011) yang menguji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pemerintah Kota Binjai. Pada penelitiannya disebutkan bahwa sumber daya manusia (SDM), komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan SAP mempunyai hubungan yang kuat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa SDM, komitmen dan perangkat pendukung merupakan faktor kendala dalam penerapan SAP di Kota Binjai.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima. Hasil temuan tersebut dapat menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi yang ada di kantor kementerian agama kota Banda Aceh relatif tinggi mampu meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arliana (2011) yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Rahmalia (2013) mengatakan bahwa dengan menggunakan indikator sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang sudah siap untuk melaksanakan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual penuh

Hasil temuan ini berbeda dengan hasil temuan Kusuma (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui analisis data dan pembahasan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa hal sebagai kesimpulan penelitian yaitu:

- a. Kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja kantor kementerian agama Kota Banda Aceh.
- b. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja kantor kementerian agama Kota Banda Aceh.
- c. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja kantor kementerian agama Kota Banda Aceh.

Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satuan kerja yang berada di lingkungan kantor kementerian agama Kota Banda Aceh, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh kota yang ada di Provinsi Aceh.
- b. Penelitian ini menggunakan data berdasarkan *cross sectional*, sehingga perubahan yang terjadi setelah tanggal pengumpulan data tidak akan tampak.

Saran

- a. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah populasi yang lebih banyak, tidak hanya pada kantor kementerian agama Kota Banda Aceh saja tetapi juga untuk seluruh kota di Provinsi Aceh, karena semakin besar jumlah populasi yang digunakan maka diharapkan semakin akurat hasil yang diperoleh sehingga lebih representatif terhadap penelitian yang dilakukan.
- b. Perlu dilakukan penelitian yang didasarkan pada data longitudinal untuk dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat mengubah kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan bagaimana perubahannya, sehingga didapatkan data yang lebih akurat.
- c. Disarankan untuk mencoba menggunakan variabel lain yang dapat dimungkinkan mempengaruhi kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arliana, G. (2011). *Implementasi basis akrual pada akuntansi sektor publik: sebuah kajian fenomenologi (Studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang makassar)*. **Skripsi tidak dipublikasikan**. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Damanik, C. (2011). *Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pemerintah Kota Binjai*. **Skripsi tidak dipublikasikan**. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Fadlan, M. (2013). Kesiapan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Universitas Gadjah Mada.
- Kusuma, M.I.Y & Fuad. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah; Studi pada satuan kerja KPPN Semarang I. **Diponegoro Jurnal of Accounting**, 2(3).
- Mardiasmo. (2002). **Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh**. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purnama, A.F.C. (2015). Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jember). **Jurnal Akuntansi Universitas Jember**, 22(1), 1-16.

Putra, Y. D. dan Ariyanto, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**, 13(1), 14-32.

Rahmalia, A. (2013). Analisis kesiapan penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan badan kepegawaian daerah dan diklat Kota Palembang. **Jurnal Ekonomi Universitas Binadarma**, 18(2), 13-27.

Ranuba, E. D. S., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan SAP Basis Akrual PP.No 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan. **Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi**, 3(1).

Sampel, I. F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan SAP Basis Akrual PP.No.71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Manado. **Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi**, 3(1).

Simanjuntak, Binsar. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. **Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia**. Jakarta.